

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya beberapa perusahaan BUMN yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi kepada pemasukan Negara, yang selanjutnya akan menjadi dana perimbangan yaitu dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4.1.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang Pantai \pm 140 kilometer persegi, dan terletak antara 112° – 113° Bujur Timur dan 7° – 8° Lintang Selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2–12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut (Gresik Dalam Angka, 2011:1).

Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan yang merupakan Sub Wilayah Pengembangan Bagian (SWPB) yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

4.1.1.2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Sedangkan profil yang perlu dijelaskan yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

Adapun tugas dari unit kerja DPPKAD Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik No.46 Pasal 3 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendapatan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
4. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Sedangkan fungsi dari unit kerja DPPKAD Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik No.46 Pasal 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pengesahan dokumen perencanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
3. Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;

4. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. Pelaksanaan pendataan, penggalian potensi dan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem akuntansi, pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
7. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan penetapan Surat Penyediaan Dana serta pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
8. Penyimpanan uang daerah, pelaksanaan penempatan dan pengelolaan uang daerah serta penyelenggaraan tertib administrasi aset daerah;
9. Pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah dan atau pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.1.3 Visi Misi DPPKAD Kabupaten Gresik

Rumusan Visi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah “Menjadi Institusi yang Transparan, Akuntabel dan Profesional dalam Pemungutan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Sedangkan misi dari dinas tersebut antara lain:

1. Menyediakan Informasi pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akurat, relevan dan tepat waktu.
2. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur.
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas kinerja aparatur didukung sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Gresik dengan menggunakan analisis *value for money* terhadap realisasi APBD tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

4.2.1 Perhitungan Ekonomis

Pengukuran ekonomis kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2007 &= \frac{643.012.773.020}{643.012.773.020} \times 100\% = 113,02\% \\ 2008 &= \frac{903.570.189.568}{807.239.039.847} \times 100\% = 111,93\% \\ 2009 &= \frac{1.116.115.000.000}{993.532.000.000} \times 100\% = 101,57\% \\ 2010 &= \frac{1.084.214.298.828}{1.043.302.834.062} \times 100\% = 103,92\% \\ 2011 &= \frac{1.266.262.000.000}{1.227.416.000.000} \times 100\% = 103,16\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ekonomis pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Ekonomis Kinerja Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Ekonomis	Keterangan
2007	643.012	726.726	113,02%	Tidak Ekonomis
2008	807.239	903.570	111,93%	Tidak Ekonomis
2009	993.532	1.009.099	101,57%	Tidak Ekonomis
2010	1.043.302	1.084.214	103,92%	Tidak Ekonomis
2011	1.227.416	1.266.262	103,16%	Tidak Ekonomis
Jumlah			533,61%	-
Rata-rata			106,72%	Tidak Ekonomis

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada tabel di atas, diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Gresik secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir (2007 sampai dengan tahun 2011) menghasilkan rata-rata di atas 100% yaitu sebesar 106,72% yang artinya pemkab Gresik tidak ekonomis dalam merealisasikan anggaran belanjanya. Pada tahun 2007 sebesar 113,02%, tahun 2008 sebesar 111,93%, tahun 2009 sebesar 101,57%, tahun 2010 sebesar 103,92% dan tahun 2011 sebesar 103,16%.

Diketahui, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 1,09% dari 113,02% di tahun 2007 menjadi 111,93%, namun belum bisa dikatakan ekonomis karena masih di atas standar kriteria ekonomis yaitu di atas 100%, hal tersebut dikarenakan besarnya realisasi komponen belanja hibah (belanja tidak langsung) dan total komponen belanja langsung.

Penurunan sebesar 10,37% di tahun 2009 dari 111,93% di tahun 2008 menjadi 101,57% sehingga meningkatkan atau lebih mendekati dengan kriteria ekonomis, namun kondisi tersebut tetap belum bisa dikatakan ekonomis karena masih berada di atas 100%. Hal tersebut dikarenakan besarnya realisasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Namun, pada tahun 2010 terjadi kenaikan hasil perhitungan ekonomisnya sebesar 2,35% dari 101,57% di tahun 2009 menjadi 103,92%, sehingga hal tersebut semakin menurunkan kriteria ekonomis pada tahun 2010. Hal tersebut disebabkan realisasi dari komponen belanja pegawai yang melebihi anggaran.

Pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 0,76% dari 103,92% di tahun 2010 menjadi 103,16%, namun tetap belum bisa dikatakan ekonomis karena realisasi belanja di atas 100%. Hal tersebut dikarenakan realisasi dari komponen belanja langsung yang meskipun teralisasi tidak sampai 100% namun beberapa komponen dari belanja tidak langsung yang melebihi anggaran.

Jika pengukuran ekonomis dilihat dari komponen belanja rutin dan belanja modal, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Perhitungan Ekonomis Komponen Belanja Rutin
Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja Rutin	Realisasi Belanja Rutin	Ekonomis	Keterangan
2007	446.416	475.210	106,45%	Tidak ekonomis
2008	536.255	592.550	110,50%	Tidak ekonomis
2009	675.947	648.771	95,98%	Ekonomis
2010	701.252	761.956	108,66%	Tidak ekonomis
2011	860.590	888.751	103,27%	Tidak ekonomis
Jumlah			524,86%	-
Rata-rata			104,97%	Tidak ekonomis

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Tabel 4.1.2
Perhitungan Ekonomis Komponen Belanja Modal
Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Ekonomis	Keterangan
2007	196.595	251.516	127,94%	Tidak ekonomis
2008	270.983	311.019	114,77%	Tidak ekonomis
2009	317.585	360.328	113,46%	Tidak ekonomis
2010	342.050	322.257	94,21%	Ekonomis
2011	366.825	377.510	102,91%	Tidak ekonomis
Jumlah			553,30%	-
Rata-rata			110,66%	Tidak ekonomis

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Hasil perhitungan dari tabel 4.1.1 dan 4.1.2 tersebut menunjukkan rata-rata sebesar 104,97% untuk hasil perhitungan belanja rutin, dan 110,66% untuk hasil perhitungan belanja modal, yang keduanya menunjukkan bahwa realisasi belanja modal dan belanja rutin pemerintah kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir tidak ekonomis.

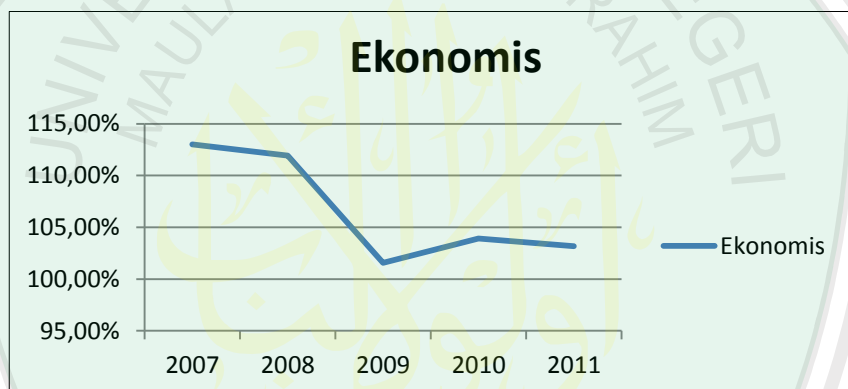
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten Gresik secara keseluruhan tidak ekonomis. Sebagian besar penyebab besarnya realisasi belanja adalah dari komponen belanja modal (pelayanan publik) dari struktur belanja hibah yang selalu melebihi anggaran yang ditargetkan. Dan secara spesifik kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja rutin Pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir lebih besar dari yang telah dianggarkan.
2. Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir lebih besar dari yang dianggarkan.

3. Realisasi total belanja Pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir lebih besar dari yang dianggarkan.

Hasil perbandingan atas kenaikan dan penurunan kriteria ekonomis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada gambar grafik 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Grafik Ekonomis Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011



Sumber : Data Sekunder yang Diolah

4.2.2 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{726.726.984.163}{740.348.393.983} \times 100\% = 98,16\%$$

$$2008 = \frac{903.570.189.568}{878.440.012.350} \times 100\% = 102,71\%$$

$$2009 = \frac{1.009.099.863.786}{970.214.666.508} \times 100\% = 104,01\%$$

$$2010 = \frac{1.084.214.000.000}{1.092.387.000.000} \times 100\% = 99,25\%$$

$$2011 = \frac{1.266.262.000.000}{1.329.151.000.000} \times 100\% = 95,27\%$$

Hasil perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Efisiensi Kinerja Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
2007	726.726	740.348	98,16%	Efisien
2008	903.570	879.726	102,71%	Tidak efisien
2009	1.009.099	970.214	104,01%	Tidak efisien
2010	1.084.214	1.092.387	99,25%	Efisien
2011	1.266.261	1.329.150	95,27%	Efisien
Jumlah			499,40%	
Rata-rata			99,88%	Efisien

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir (2007 sampai dengan tahun 2011) menghasilkan rata-rata yang cukup efisien, karena hasil perhitungannya di bawah 100% yaitu sebesar 99,88%. Pada tahun 2007 sebesar 98,16%, tahun 2008 sebesar 102,71%, tahun 2009 sebesar 104,01%, tahun 2010 sebesar 99,25% dan tahun 2011 sebesar 95,27%.

Pada tahun 2008 terjadi kenaikan hasil perhitungan efisien sebesar 4,55% atau sebesar 98,16% di tahun 2007 menjadi 102,71%. Kenaikkan tersebut disebabkan oleh komponen pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya menurun dari tahun 2007 yaitu hanya sebesar Rp 118.500.000 sementara sebelumnya terealisasi sebesar Rp 1.313.359.890 dan komponen belanja hibah dan belanja langsung yang terealisasi lebih besar dari yang dianggarkan.

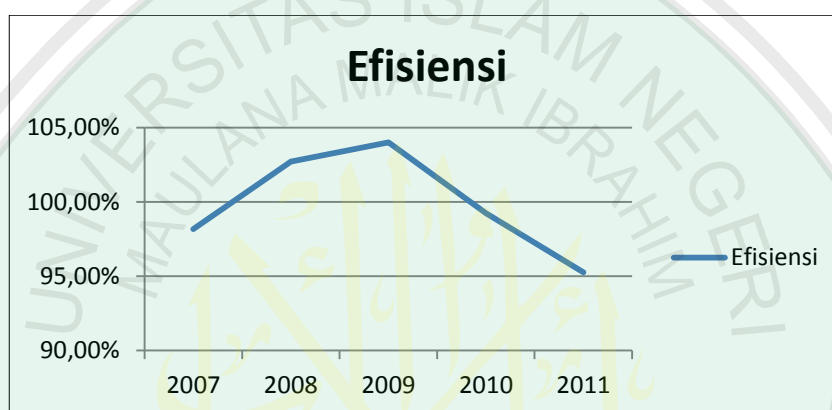
Sedangkan kenaikan di tahun 2009 sebesar 1,30% atau dari 102,71% di tahun 2008 menjadi 104,01%, disebabkan hasil realisasi komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih rendah dari yang dianggarkan dan lebih rendah dari tahun sebelumnya, sementara komponen belanja tidak langsung terealisasi lebih besar dari anggaran.

Sementara pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 4,75% dari 104,01% menjadi 99,25% yang artinya pengelolaan keuangan pemkab Gresik pada tahun 2010 bisa dikatakan cukup efisien. Hal tersebut disebabkan realisasi pendapatan dari komponen pendapatan lain-lain yang sah sangat meningkat dari tahun sebelumnya.

Dan pada tahun 2011 pengelolaan keuangan pemkab Gresik bisa dikatakan kinerja yang paling efisien dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,27%. Hal ini disebabkan tingginya penerimaan yang diperoleh dari komponen pendapatan asli daerah dan komponen pendapatan lain-lain dari tahun sebelumnya.

Hasil perbandingan atas kenaikan dan penurunan kriteria efisiensi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada gambar grafik 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Grafik Efisiensi Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011



Sumber : Data Sekunder yang Diolah

4.2.3 Perhitungan Efektivitas

Pengukuran efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{740.348.393.983}{691.204.883.039} \times 100\% = 107,11\%$$

$$2008 = \frac{879.726.056.652}{833.210.810.340} \times 100\% = 105,43\%$$

$$2009 = \frac{970.214.666.508}{890.697.000.000} \times 100\% = 108,93\%$$

$$2010 = \frac{1.092.387.177.610}{923.180.486.058} \times 100\% = 118,33\%$$

$$2011 = \frac{1.329.150.833.376}{1.182.256.290.702} \times 100\% = 112,42\%$$

Hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Efektivitas	Keterangan
2007	740.348	691.204	107,11%	Sangat efektif
2008	879.726	833.210	105,43%	Sangat efektif
2009	970.214	890.697	108,93%	Sangat efektif
2010	1.092.387	923.180	118,33%	Sangat efektif
2011	1.329.150	1.182.256	112,42%	Sangat efektif
Jumlah			552,37%	-
Rata-rata			110,47%	Sangat efektif

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir (2007 sampai dengan tahun 2011) menghasilkan rata-rata sebesar 110,47% yang artinya sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya. Pada tahun 2007 sebesar 107,11%, tahun 2008 sebesar 105,43%, tahun 2009 sebesar 108,93%, tahun 2010 sebesar 118,33% dan tahun 2011 sebesar 112,42%.

Namun pada tahun 2008 dan 2011 terjadi penurunan efektivitas sebesar 1,53% dari 107,11% pada tahun 2007 menjadi 105,43% di tahun

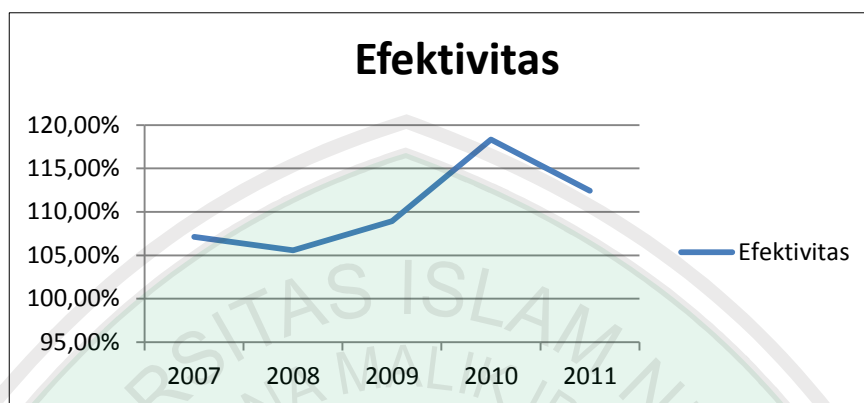
2008. Hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan dari bantuan keuangan yang diperoleh dari provinsi atau pemda lainnya yang terealisasi hanya sebesar 21% dan 8% dari anggaran, serta komponen pendapatan lain-lain yang 100% tidak terealisasi.

Tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 3,34% dari 105,58% menjadi 108,33%. Hal ini dikarenakan besarnya realisasi dari komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain. Sementara kenaikan di tahun 2010 sebesar 9,40% dari 108,93% menjadi 118,33% dikarenakan besarnya komponen pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar 299%.

Dan terjadi penurunan pada tahun 2011 sebesar 5,90% dari 118,33% menjadi 112,32% dikarenakan komponen pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya terealisasi lebih kecil yaitu hampir 30 kali lipat dari tahun 2010.

Hasil perbandingan atas kenaikan dan penurunan kriteria efektivitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada gambar grafik 4.3 berikut:

Gambar 4.3
Grafik Efektivitas Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2007-2011



Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Jika pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2007 sampai tahun 2011 sudah sangat efektif, namun belum tentu pemkab tersebut sudah mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut dapat diketahui dengan rasio kemandirian yang membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi pemerintahan pusat dan propinsi. Rasio ini menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendahnya ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi), begitu pula sebaliknya.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{BPP \text{ atau } PP}$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{115.311.154.263}{53.709.119.748} = 215\%$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{135.712.235.753}{54.537.081.847} = 249\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2009} &= \frac{168.302.821.580}{90.960.199.089} &&= 185\% \\ \text{Tahun 2010} &= \frac{167.644.725.522}{218.686.894.296} &&= 77\% \\ \text{Tahun 2011} &= \frac{273.975.992.140}{282.687.676.760} &&= 97\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa dalam lima tahun sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 pemerintah kabupaten Gresik sudah mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dan tidak bergantung dari dana eksternal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Gresik selama tahun 2007 sampai 2011 selain sangat efektif juga juga sangat mandiri dalam membiayai pemerintahannya sendiri.